

**ANALISIS PENGEMBANGAN *ELECTRONIC GOVERNMENT*
MELALUI PENYELENGGARAAN WEBSITE
DI KABUPATEN KUDUS**

Oleh :

M. Syaiful Arif, Endang Larasati S., Rihandoyo

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana.Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Use of information technology is very important in government institutions, such as the electronic government, where the government attempted to improve service to the community in a more convenient, fast, effective and efficient. Development of e-government in Kudus district that has not run up pushing me to do this research. The research problem is : How does the development of e-government in Kudus district? and what constraints the development of e-government in Kudus district?.

The purpose of this study to describe and analyze how the development of e-government and to describe the obstacles faced by the development of e-government in the District of Kudus. To answer the problem and the research objectives using successful elements of e-government development in the Harvard JFK School of Government, namely : support, capacity, and value. It also uses elements of the development of e-government according to Moon in Book Information Management System consists of a willingness and local culture. This study uses descriptive qualitative sample snowballing technique so that it can be explained the extent to which the development of e-government in the District of Kudus. There are two sources of data were used, namely primary and secondary data. This study using in-depth interviews, observation, and documentation as well as triangulation associated with the development of electronic government in Kudus district in collecting the data.

The results showed that the implementation of e-government in the District of Kudus has not been able to run optimally because there are issues that affect development, as there is no support in the implementation of e-government in the absence of the political will of the government's full and socialization. Capacity is very limited financial resources, human resources and technology infrastructure is still inadequate . The absence of public willingness to use and avail the facility of e-government as well as the cultural/local culture Kudus Regency society who prefer the manual way instead of using information technologies in a variety of jobs.

Keywords :

Electronic government , elements of e-Government development

PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi pada akhirnya akan merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan. Perubahan-perubahan menuju pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel yang mulai dilakukan akan melahirkan tata pemerintahan yang baik atau *good government*. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi sangat penting dalam institusi pemerintah, seperti dengan adanya *electronic government*, dimana pemerintah berupaya untuk memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat secara lebih mudah, cepat, murah, dan efisien.

Esensi dari penerapan *e-government* adalah pemberian pelayanan dari pemerintah terhadap masyarakat. Pelaksanaan *electronic government* di Indonesia sendiri telah diperkenalkan pada tahun 2001 dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telekomunikasi, Media dan Informatika yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi informatika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Selanjutnya muncul Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, yang menyatakan bahwa pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-government* dapat dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Tahun 2006 pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 2006 membentuk Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional yang salah satu tugasnya adalah mempercepat proses implementasi *e-government*.

Pemerintah Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan pemerintahannya telah menerapkan *e-government*. Terkait dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003, penyelenggaraan *e-government* di Kabupaten Kudus terkandung dalam salah satu misi Kabupaten Kudus yang berbunyi “mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*)”. Dalam mewujudkan *good governance* perlu adanya suatu dukungan baik dari pemerintah dan juga masyarakat, serta didukung dengan semangat keterbukaan informasi sehingga dapat membantu mengembangkan daerah dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang membutuhkannya. Upaya mewujudkan *good government* dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat mutlak dilakukan, hal tersebut menyangkut keamanan, ketertiban untuk lebih menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat. Aparatur yang profesional menjamin terwujudnya pemerintah yang efisien dan menjamin terwujudnya pelayanan public yang baik. Untuk mewujudkan pemerintah yang baik perlu didukung semangat keterbukaan yang salah satunya dapat dicapai melalui pelaksanaan *e-government*.

1. 2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan tentang apa yang ingin dicapai oleh peneliti atas hasil penelitian yang ingin dipahami dan diteliti, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis bagaimana proses pengembangan *e-government* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis kendala / hambatan yang dihadapi dalam pengembangan *e-government* di Kabupaten Kudus.

1. 3. Teori

Good Governance

Pemerintahan yang baik adalah praktek pemerintah yang mengemban fungsi dalam mengelola administrasi pemerintahan dan memberikan layanan

yang maksimal kepada masyarakat. Menurut Dadang Solihin (2008:29) terjadi pergeseran paradigma dari *government* menjadi *governance*, yaitu : “*Government* memberikan hak eksklusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, sementara aktor di luarnya hanya dapat disetarakan sejauh negara mengizinkannya. Sedangkan *governance*, persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, *civil society* dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama”.

Tata pemerintahan yang baik adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan di antara mereka.

a. Definisi Good Governance

Good governance menurut Bank Dunia (*World Bank*) adalah cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya social dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat.

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) *good governance* dimaknai sebagai praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan Negara secara politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan.

Good governance diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkemampuan mengelola berbagai sumber daya yang bersifat sosial dan ekonomi dengan baik untuk kepentingan sebesar-besarnya rakyat Indonesia berdasarkan asas musyawarah dan mufakat. Sedangkan wujudnya di Indonesia berupa penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, efisien dan efektif, tanggap dan bertanggung jawab,

bertindak dan berpihak pada kepentingan rakyat, serta mampu menjaga keselarasan hubungan kemitraan melalui proses interaksi yang dinamis dan konstruktif antara pemerintah, rakyat dan berbagai kelompok kepentingan di dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia.

b. Prinsip-Prinsip Good Governance

- a) Partisipasi
- b) Supremasi Hukum
- c) Transparansi
- d) Cepat Tanggap atau Peduli pada *Stakeholder*
- e) Membangun Konsensus
- f) Kesetaraan
- g) Efektif dan Efisien
- h) Bertanggungjawab atau Akuntabilitas
- i) Visi Strategis

Untuk terwujudnya prinsip-prinsip tersebut, perlu didukung oleh adanya struktur kelembagaan yang akomodatif, sumber daya aparatur yang professional,serta ketetalaksanaan yang *responsife* dan *adaptif*. Sehingga demikian koordinasi dan sinkronisasi menjadi hal yang sangat penting untuk dapat terlaksananya pembangunan yang sinergi dan optimal.

Electronic Government

Dalam pencapaian *good government* dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu salah satunya dengan penerapan *e-government*. Melalui *e-government* pelaksanaan manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dapat optimal dalam pemanfaatan teknologi informasi.

a. Definisi Electronic Government

Menurut Richardus E. Indrajit, *e-government* adalah penggunaan ICT (*Information Comunication Technology*) untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain (Indrajit,2004:3-4).

The World Bank memberikan pendefinisian tentang *e-government* sebagai berikut: *e-government* berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti WAN, *internet dan mobile computing*) oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai

kemampuan membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan (Indrajit,2004:3).

Berdasarkan definisi *e-government* tersebut dapat dilihat bahwa *e-government* identik dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dapat dikatakan juga bahwa *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan hubungan antar pemerintah dengan pihak lain.

b. Manfaat *Electronic Government*

Berdasarkan beberapa manfaat yang diperoleh dari konsep *e-government* di atas, secara umum manfaat-manfaat tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu :

1. Internal

Manfaat ini merupakan keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh badan/lembaga yang menerapkan konsep *e-government*, seperti :

- Meningkatnya hubungan atau jaringan komunikasi dengan pihak dan/atau departemen lain,
- Meningkatnya efektivitas dan efisien penyelenggaraan pelayanan,
- Penyediaan dan pemberian pelayanan dan/atau informasi yang lebih mudah, cepat, dan murah,
- Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- Memberikan sumber pendapatan baru bagi pemerintah.

2. Eksternal

Manfaat ini merupakan keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh pihak-pihak lain (masyarakat, kalangan bisnis, dan swasta) dari penerapan konsep *e-government* yang dilakukan pemerintah, seperti :

- Masyarakat dapat memperoleh pelayanan dengan biaya administrasi yang rendah, cepat, dan mudah.

- Tersedianya informasi-informasi tentang kebijakan, potensi wilayah, dan lain sebagainya yang bisa diakses setiap saat.
- Masyarakat dapat berpartisipasi melalui polling-polling yang diadakan pemerintah.

Dalam Inpres No.3 tahun 2003 pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan pemerintahan yang berbasis elektronik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di pemerintahan dengan mengoptimisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Elemen Sukses Pengembangan *E-Government*

Menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government*, untuk menerapkan konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah :

Support, yang mendukung dalam pengembangan *e-government*, antara lain:

- *Political Will*, sejauhmana dukungan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam kemauan pemerintah Kabupaten Kudus dalam mengembangkan *e-government*
- Kontinuitas, keberlanjutan penerapan *e-government* di Kabupaten Kudus yang mencakup perencanaan *e-government* di Kabupaten Kudus kedepannya.
- Sosialisasi, mengetahui bagaimana pemerintah dalam mensosialisasikan pengembangan *e-government* tersebut.

Capacity, merupakan kemampuan pemerintah dalam mewujudkan *e-government*, antara lain :

- Sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki keahlian dalam mengelola dan mengakses teknologi informasi agar penerapan

e-government sesuai yang diharapkan.

- Sumber daya finansial, untuk mengetahui anggaran yang ditetapkan dan pengalokasian dana dalam pengembangan *e-government*.
- Infrastruktur, melihat bagaimana ketersediaan infrastruktur teknologi *Value*, keuntungan manfaat yang diperoleh dengan adanya pengembangan *e-government* tersebut, khususnya manfaat yang akan diperoleh masyarakat dengan adanya *e-government*

Selain itu ada juga elemen sukses pengembangan *e-government* lain, dalam buku Sistem Informasi Manajemen karya Dr. Ir. Eko Nugroho yang dikemukakan oleh Moon (2008:168) yaitu *Willingness* dan *Local Culture*. *Willingness* diartikan sebagai kemauan/komitmen untuk melakukan sesuatu hal. Adanya persepsi masyarakat akan ICT mempengaruhi kemauan menggunakan fasilitas ICT (Stevanus Wisnu W, 2006:4).

Selanjutnya terdapat *Local Culture* atau budaya lokal yang mempengaruhi penerapan *e-government* terkait dengan kemampuan dalam memasyarakatkan transaksi elektronik. Begitu juga kesiapan masyarakat pengguna, dimana hubungan dengan kemampuan masyarakat di dalam menggunakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang terdapat di dalam penerapan *e-government* tersebut. Peran masyarakat sangat memiliki pengaruh dalam pencapaian kesuksesan penerapan *e-government* (Eko Nugroho, 2008:168)

Tahapan Penerapan *Electronic Government*

Jangka waktu penerapan pengembangan *e-government* disetiap lembaga pemerintahan mengacu pada pentahapan pengembangan secara nasional, namun hal tersebut bervariasi sesuai kondisi yang ada. Pentahapan dalam penerapan pengembangan *e-government* tersebut mengikuti tingkatan-tingkatan berikut :

1. Tingkat persiapan, antara lain:

- a. Pembuatan situs *website* pemerintahan

b. Pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia pada penerapan *e-government*.

c. Menyediakan sarana dan akses publik, seperti warnet dan lain-lainnya.

d. Sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik, baik untuk internal maupun public

e. Pengembangan motivasi *leadership* dan kesadaran akan pentingnya manfaat *e-government*

2. Tingkat pematangan :

a. Pembuatan situs informasi layanan interaktif, antara lain dengan menambahkan mesin pencari, fasilitas tanya jawab dan lain-lain.

b. Membuat hubungan dengan situs informasi lembaga lainnya (*hyperlink*)

3. Tingkat pematangan :

a. Penyediaan fasilitas transaksi secara elektronik, dengan menambahkan fasilitas penyerahan formulir, fasilitas pembayaran dan lain-lain.

b. Penyatuan aplikasi yang digunakan dan data dengan lembaga lain

4. Tingkat pemanfaatan.

a. Pembuatan berbagai aplikasi untuk pelayanan G2G (*Government to Government*), G2B (*Government to Bussines*) dan G2C (*Government to Citizen*) serta G2E (*Government to Employees*) yang terintegrasi.

b. Penyempurnaan kualitas pelayanan yang terbaik

1. 4. Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif

B. Fokus dan Lokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah pengembangan *e-government* di Kabupaten Kudus, faktor pendorong dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan *electronic goverment* di Kabupaten Kudus. Sedangkan lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

C. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 instrumen, yaitu : Peneliti sebagai instrumen penelitian, *Interview Guide*, Informan.

D. Sumber data

Sumber data yang digunakan yaitu Data primer dan Data sekunder

E. Teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara mendalam, dokumentasi, observasi dan Triangulasi

F. Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik reduksi Data, Penyajian Data, Menarik Kesimpulan dan verifikasi.

PEMBAHASAN

2. 1. Elemen Sukses Pengembangan *Electronic Government* di Kabupaten Kudus

a. *Support*

Support merupakan salah satu elemen penting penentu kesuksesan dalam penerapan *e-government* yang berupa dukungan untuk diterapkannya *e-government*, terdiri dari :

1. *Political Will*

Political will merupakan dukungan pemerintah untuk benar-benar menerapkan *e-government*. Tanpa adanya *political will* tidak mungkin proses pembangunan dan pembangunan *e-government* di Kabupaten Kudus berjalan dengan baik. Adanya dukungan *political will* merupakan sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam penerapan *e-government*. Dalam penyelenggaraan *e-government* di Kabupaten Kudus peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan yaitu :

- 1) Instruksi presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*
- 2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan *Electronic Government* di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kudus
- 3) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus

Berbagai regulasi yang digunakan dalam penerapan *e-government* di Kabupaten Kudus terlihat kurang kuat dan isinya kurang mendetail dalam pengaplikasian *e-government* di Kabupaten Kudus, hal tersebut terbukti dari terkendalanya berbagai pengadaan anggaran, infrastruktur sarana prasana serta sumber daya manusia dalam rangka penerapan *e-government* sehingga penerapan *e-government* di Kabupaten Kudus belum berjalan maksimal.

2. Sosialisasi

Pemerintah perlu mensosialisasi kan adanya penerapan *e-government* agar masyarakat mengetahui dan menikmati layanan pemerintah yang berbasis elektronik. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah kabupaten kudus dalam memperkenalkan *e-government* telah dilakukan kepada internal antar SKPD, tetapi sosialisasi dengan mempertemukan langsung antara pihak pemerintah dengan masyarakat belum pernah dilakukan, sehingga masyarakat sebagai pengguna *website* belum mengetahui dan menikmati layanan pemerintah.

3. Kontinuitas

Kontinuitas merupakan keberlanjutan dari penerapan *e-government* di Kabupaten Kudus. Pengembangan *e-government* di Kabupaten Kudus difokuskan pada pengintegrasian seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Kudus dalam satu portal sehingga penyebaran data dan informasi dapat terkoordinasi dengan satu server melalui Dinhubkominfo, agar masyarakat sebagai pengguna layanan akan menjadi lebih mudah terkoneksi dan terlayani dengan baik.

b. *Capacity*

Penerapan *e-government* sangat dipengaruhi oleh seberapa besar kemampuan (*capacity*) dari pemerintah setempat dalam mewujudkan *e-government*. Kemampuan yang

mempengaruhi terlaksananya *e-government* di Kabupaten Kudus adalah sumber daya manusia, sumber daya financial, dan ketersediaan infrastruktur.

1. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia atau pegawai di Bagian Kominfo sebagai unsur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan *e-government* di Kabupaten Kudus sampai saat ini masih terbatas. Pegawai yang menguasai TI dan memiliki kompetensi di bidang TI masih sangat sedikit. Dalam pembangunan *website* resmi pemerintah Kabupaten Kudus sumber daya manusia secara kuantitas maupun kualitas masih sangat terbatas.

2. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial merupakan salah satu hal terpenting dalam menunjang kesuksesan penerapan *e-government* di suatu daerah. Sumber daya finansial dibutuhkan untuk mendukung tersedianya sumber daya yang lain, seperti infrastruktur teknologi informasi dan sumber daya manusia untuk pelatihan pegawai, penambahan dan perawatan alat serta biaya yang lainnya. Sumber daya finansial dalam penerapan *e-government* di Kabupaten Kudus hanya berasal dari APBD dalam bentuk platfon dan tidak ada peningkatan anggaran yang signifikan setiap tahunnya, sehingga jumlah anggaran masih terbatas serta belum adanya kerjasama dengan pihak swasta / *stakeholder* lainnya.

3. Infrastruktur Teknologi Informasi

Tanpa adanya infrastruktur yang mendukung maka tidak mungkin suatu pemerintahan berbasis elektronik terwujud. Infrastruktur dalam penerapan *e-government* di Kabupaten Kudus berkembang dan mengalami peningkatan cukup baik pada setiap tahunnya, karena hampir di tiap SKPD di Kabupaten Kudus sudah terkoneksi secara intern, meskipun dalam pelaksanaannya juga mengalami beberapa kendala faktor alam maupun kendala secara teknis serta dalam perawatannya, seperti kerusakan alat

ataupun bergesernya antena pengarah yang disebabkan oleh faktor cuaca.

c. Value

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah Kabupaten Kudus setelah diterapkannya *e-government* antara lain : meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional pelaksanaan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun *stakeholder*. Melalui *website* resmi pemerintah Kabupaten Kudus, pemerintah dapat meningkatkan transparansi dalam rangka mewujudkan *good governance* dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kudus

Manfaat yang diperoleh oleh pihak swasta dan masyarakat sebagai pengguna serta merupakan objek diterapkannya pemerintahan berbasis elektronik antara lain : melalui *website* resmi pemerintah Kabupaten Kudus pihak swasta maupun masyarakat mendapatkan berbagai informasi mengenai Kabupaten Kudus secara mudah dan cepat, serta dapat berkomunikasi dengan Pemerintah dengan memberikan kritik saran dan pertanyaan kepada Pemerintah tanpa harus datang ke tempat melalui fasilitas yang telah tersedia di *website*, sehingga masyarakat juga dapat mengontrol kinerja pemerintah.

d. Willingness

Willingness atau kemauan masyarakat menjadi salah satu elemen keberhasilan *e-government*, karena masyarakat sebagai objek dari diterapkannya Pemerintahan berbasis elektronik, tanpa adanya dukungan dari masyarakat maka penerapan *e-government* sendiri tidak akan berhasil. Dalam penerapan *e-government* di Kabupaten Kudus belum adanya kesadaran masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemerintahan berbasis elektronik terbukti dari beberapa masyarakat yang memberikan pernyataan belum mengetahui ataupun belum pernah mengunjungi *website* resmi Pemerintah Kabupaten Kudus karena jarang mengakses *internet*.

e. *Local Culture*

Elemen yang terakhir dalam pengembangan *e-government* adalah *local culture*. Budaya yang ada di masyarakat merupakan faktor penting lainnya yang mempengaruhi pandangan masyarakat akan teknologi informasi, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan penerapan *e-government* di suatu daerah. Sebagian masyarakat Kabupaten Kudus belum sepenuhnya *melek* komputer dan internet, hal tersebut disebabkan oleh budaya masyarakat yang lebih menyukai cara manual dari pada menggunakan media elektronik dalam melakukan berbagai pekerjaan, terlebih dalam masyarakat yang sudah berumur yang cenderung telah nyaman menggunakan cara manual, oleh karena itu tidak ada keinginan untuk mempelajari komputer maupun internet.

2.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pengembangan *Electronic Government* di Kabupaten Kudus

a. Faktor Pendorong

Faktor pendorong pengembangan *e-government* di Kabupaten Kudus yaitu :

1. Adanya Bidang Komunikasi dan Informatika yang berada di lingkup Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan serta bertanggung-jawab dengan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
2. Adanya keberlanjutan penerapan *e-government* di Kabupaten Kudus mencakup perencanaan pengembangan *e-government* di Kabupaten Kudus kedepan yang difokuskan pada pengintegrasian seluruh SKPD di kabupaten Kudus yang ada di Kabupaten Kudus dalam satu portal sehingga penyebaran data dan informasi dapat terkoordinasi dalam satu server Dinhubkominfo.

b. Faktor Penghambat

Hambatan yang terjadi dalam pengembangan *e-government* di Kabupaten Kudus, antara lain :

1. Belum adanya sosialisasi langsung yang mempertemukan antara pemerintah dengan masyarakat tentang adanya *website* resmi Pemerintah Kabupaten Kudus.
2. Terbatasnya sumber daya financial
3. Terbatasnya sumber daya manusia yang mengelola *e-government* baik dari secara kualitas maupun kuantitas.
4. Belum terintegrasinya seluruh SKPD dalam satu portal server Dinhubkominfo.
5. Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas *e-government* karena masyarakat belum sepenuhnya *melek* komputer ataupun internet.
6. Budaya lokal masyarakat yang masih menggunakan cara manual dalam melakukan berbagai pekerjaan dari pada menggunakan teknologi informasi.

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Electronic Government merupakan penggunaan teknologi informasi bagi pelayanan pemerintah kepada publik. Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Penerapan *e-government* di Kabupaten Kudus di kelola oleh Bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) Kabupaten Kudus sebagai unsur yang bertanggungjawab di dalam pembangunan dan pengembangan *e-government* di Kabupaten Kudus. *E-government* di Kabupaten Kudus belum dapat dikatakan berjalan secara maksimal, hal tersebut diteliti dan diidentifikasi dalam pembahasan yang telah dilakukan dengan melalui sejauhmana terlaksananya elemen sukses pengembangan *e-*

government yang terdiri dari *support*, *capacity*, *value*, *willingness* dan *local culture*.

Terdapat faktor-faktor pendorong maupun menghambat di dalam pengembangan *e-Government* di Kabupaten Kudus. Faktor pendorong yaitu :

1. Adanya Bidang Komunikasi dan Informatika yang berada di lingkup Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus yang mempunyai tugas dan bertanggungjawab dengan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
2. Adanya keberlanjutan penerapan *e-government* di Kabupaten Kudus mencakup pengembangan *e-government* di Kabupaten Kudus kedepan yang difokuskan pada pengintegrasian seluruh SKPD di kabupaten Kudus dalam satu portal sehingga penyebaran data dan informasi dapat terkoordinasi dalam satu server Dinhubkominfo.

Sedangkan Hambatan yang terjadi dalam pengembangan *e-government* di Kabupaten Kudus, adalah :

1. Belum adanya sosialisasi langsung yang mempertemukan antara pemerintah dengan masyarakat tentang adanya *website* resmi Pemerintah Kabupaten Kudus.
2. Terbatasnya sumber daya financial
3. Terbatasnya sumber daya manusia yang mengelola *e-government* baik dari secara kualitas maupun kuantitas.
4. Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas *e-government* karena masyarakat belum sepenuhnya *melek* komputer ataupun internet.
5. Budaya lokal masyarakat yang masih menggunakan cara manual dalam melakukan berbagai pekerjaan dari pada menggunakan teknologi informasi.

3.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang diberikan untuk

meningkatkan kualitas pengembangan *e-government* di Pemerintah Kabupaten Kudus antara lain :

1. Meningkatkan anggaran untuk pengembangan *e-government* di Kabupaten Kudus dengan menambahkan anggaran dan kerjasama yang lebih luas dengan pihak swasta / *stakeholder*.
2. Meningkatkan infrastruktur dengan penambahan area *hotspot*, penambahan *bandwith* serta mengkoneksikan seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Kudus.
3. Perlu meningkatkan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas melalui pelatihan-pelatihan, bekerjasama dengan pihak luar yang lebih berkompeten di bidang teknologi informasi.
4. Perlu adanya sosialisasi secara kontinyu dan mengedukasi masyarakat tentang adanya *e-government* serta pemanfaatannya melalui media publik yang ada seperti radio, stiker, spanduk serta mengadakan sosialisasi yang mempertemukan langsung antara pemerintah dengan masyarakat.
5. Layout tampilan *website* agar dibuat lebih menarik dan *interaktif*, serta sarana forum tanya jawab maupun kritik untuk lebih sering di respon dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. Khoirul. 2004. *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah, SIMDA*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Azhari, Idham Ibtly dkk, 2002, *Good Governance dan Otonomi Daerah* , Jakarta :PT. Rineka Cipta
- Indrajit, Richardus Eko, 2004, *Electronic Government*, Yogyakarta : Andi.
- Indrajit, Richardus Eko dkk, 2005, *E-Government In Action*, Yogyakarta : Andi.
- Nugroho, Eko. 2008. *Sistem Informasi Manajemen*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Wijaya, Stefanus Wisnu. 2006. *Kajian Teoritis: Model E-Government Readiness Pemerintah Kabupaten/Kotamadya dan Keberhasilan E-Government*. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2006 (SNATI 2006) ISBN: 979-756-061-6 Yogyakarta.
- Dishubkominfo Kabupaten Kudus, 2008 *Master Plan e-Government Kabupaten Kudus*
- Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika)
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
- Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan *Electronic Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten kudus
- Internet :
- <http://www.kuduskab.go.id/>
- <http://www.ml.scribd.com/doc/8755462/Penerapan-E-Government-di-Indonesia>
- http://www.id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kudus
- <http://www.dinhubkominfo.kuduskab.go.id/>